



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar tabel.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II.....	6
Dengan 2023.....	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat..	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja PD.....	43
3.3.Program dan Kegiatan.....	45
3.4 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Beserta Anggaran	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	48
BAB V P E N U T U P.....	58
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.....	58
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2022.....	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim.....	33
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2023.....	37
Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan.....	41
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	49

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan P-Renja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda,

2023

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19680215 198903 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perangkat daerah dari perencanaan sebelumnya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perubahan rencana tahunan perangkat daerah, perubahan renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah. Penyusunan perubahan rencana kerja dilakukan dari evaluasi yang telah direncanakan terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar disusun secara terpadu guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Perubahan rencana kerja perangkat daerah adalah perubahan dokumen perencanaan SKPD dari perencanaan sebelumnya untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam perubahan renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 mengacu kepada rencana program pada rancangan awal perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan perubahan renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaras dengan Renstra Perubahan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan perubahan rencana kerja (Renja) BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

8. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 -2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perubahan Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- a. Menyelaraskan perubahan RKPD dengan Renstra PD yang diturunkan dalam kegiatan penganggaran ;
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan pemanfaatan sumber daya dan keuangan;

Tujuan antara lain :

- a. Menjabarkan Perubahan RENSTRA ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Sebagai Upaya mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program, kegiatan pada BPKAD Provinsi Kaltim;

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat :

1. 1 Latar Belakang
1. 2 Landasan Hukum
1. 3 Maksud Tujuan dan
1. 4 Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat :

- 1.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja PD
- 1.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Pagu Anggaran untuk program dan kegiatan
- 4.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil Langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Realisasi Renja PD Tahun 2022 yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan perkiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) tahun berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistem dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat acuan dalam menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta pagu indikatif.

Pagu belanja tahun 2022 sebesar Rp. 5.065.343.522.960 dan Realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 4.479.990.618.694 atau sebesar 88,44 % yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pagu program sebesar Rp 55.331.155.148

Realisasi sebesar Rp 44.915.900.888 atau sebesar 81,18 %

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pagu program sebesar Rp. 5.003.289.730.312

Realisasi sebesar Rp. 4.428.852.855.721 atau sebesar 88,52 %

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pagu program sebesar Rp. 6.722.637.500

Realisasi sebesar Rp. 6.221.862.085 atau sebesar 92,55 %

Adapun Capaian dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai Tahun 2022 antara lain sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program (Renstra PD) Thn. 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S.D Tahun Berjalan					
							Target Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S.D Tahun Berjalan	Realisasi Tingkat Capaian Target				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	8= (7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	11=(10/4)				
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	80,00%		81,18%		80,00%	81,18%	101,48 %	90,00%	196,19%	82%				
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%		100%	100%	100%	100%	233,33%	233%				
5.02.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	100%

5.02.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	100%

5.02.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100%	7	Laporan	21	Laporan	100%
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	233,33%		233%
5.02.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124	Orang/Bulan	124	Orang/Bulan	124	Orang/Bulan	124	Orang/Bulan	100%	124	Orang/Bulan	372	Orang/Bulan	100%
5.02.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400	Dokumen	400	Dokumen	400	Dokumen	400	Dokumen	100%	400	Dokumen	1.200	Dokumen	100%
5.02.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400	Dokumen	400	Dokumen	400	Dokumen	400	Dokumen	100%	400	Dokumen	1.200	Dokumen	100%
5.02.001.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%

5.02.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100%
5.02.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	9	Dokumen	100%
5.02.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100%	3	Laporan	9	Laporan	100%
5.02.001.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%

5.02.001.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	233,33%		233%
5.02.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	100%
5.02.001.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
5.02.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140	Orang	140	Orang	140	Orang	140	Orang	100%	140	Orang	420	Orang	100%
5.02.001.1.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140	Orang	140	Orang	140	Orang	140	Orang	100%	140	Orang	420	Orang	100%

5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100%	6	Laporan	18	Laporan	100%

5.02.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
5.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tesedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	233,33%		233%
5.02.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	3	Unit	100%
5.02.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	20	Unit	20	Unit	20	Unit	100%	20	Unit	60	Unit	100%
5.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	233,33%		233%

5.02.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	233,33%		233%
5.02.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100%	6	Unit	18	Unit	100%

5.02.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	25	Unit	25	Unit	25	Unit	100%	25	Unit	75	Unit	100%
5.02.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	12	Unit	12	Unit	12	Unit	100%	12	Unit	36	Unit	100%
5.02.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	5	Unit	15	Unit	100%
5.02.002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	80,00%		80,00%		100,00%		89%		89%	80%		198,67%		83%
5.02.002.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.002.1.01.001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%

5.02.002.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.01.003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.01.004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37	Dokumen	37	Dokumen	37	Dokumen	37	Dokumen	100%	37	Dokumen	111	Dokumen	
5.02.002.1.01.005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37	Dokumen	37	Dokumen	37	Dokumen	37	Dokumen	100%	37	Dokumen	111	Dokumen	

5.02.002.1.01.006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.01.007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.01.008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0		0		0		0		0%	0		0		
5.02.002.1.01.009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.01.011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%

5.02.002.1.01.013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah dan Pemerintah Provinsi	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%		100%		100%		100%		100%	233,33%		233%
5.02.002.1.02.002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.002.1.02.003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	0		0		0		0		0,00	0		0		

5.02.002.1.02.004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100%	10	Laporan	30	Laporan	100%
5.02.002.1.02.006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	B,	12	B,	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.002.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		100		1.929.905.457
5.02.002.1.03.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100%

5.02.002.1.03.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460	Dokumen	460	Dokumen	460	Dokumen	460	Dokumen	100%	460	Dokumen	1.380	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16	Dokumen	16	Dokumen	16	Dokumen	16	Dokumen	100%	16	Dokumen	48	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%

		Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
5.02.002.1.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12.000	Dokumen	12.000	Dokumen	12.000	Dokumen	12.000	Dokumen	100%	12.000	Dokumen	36.000	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.002.1.03.011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10	Orang	10	Orang	10	Orang	10	Orang	100%	10	Orang	30	Orang	100%

5.02.002.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.002.1.04.001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	12	Laporan	100%
5.02.002.1.04.002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84	Dokumen	84	Dokumen	84	Dokumen	84	Dokumen	100%	84	Dokumen	252	Dokumen	100%
5.02.002.1.04.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.002.1.04.004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	100%	48	Laporan	144	Laporan	100%
5.02.002.1.04.005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	106	Dokumen	106	Dokumen	106	Dokumen	106	Dokumen	100%	106	Dokumen	318	Dokumen	100%

	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
5.02.002.1.04. 006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	6	Dokumen	18	Dokumen	100%
5.02.002.1.04. 008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576	Dokumen	576	Dokumen	576	Dokumen	576	Dokumen	100%	576	Dokumen	1.728	Dokumen	100%
5.02.002.1.04. 009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.002.1.04. 010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.002.1.04. 011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480	orang	480	orang	480	orang	480	orang	100%	480	orang	1.440	orang	100%

5.02.002.1.04.012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6	Lembaga	6	Lembaga	6	Lembaga	6	Lembaga	100%	6	Lembaga	18	Lembaga	100%
5.02.002.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	233,33%		233%
5.02.002.1.05.002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	100%
5.02.002.1.05.008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100%	10	Laporan	30	Laporan	100%
5.02.002.1.05.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21	Laporan	21	Laporan	21	Laporan	21	Laporan	100%	21	Laporan	63	Laporan	100%
5.02.002.1.05.010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	100%	16	Laporan	48	Laporan	100%

5.02.002.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.002.1.06.002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
5.02.003	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap (Tanah & Bangunan) Daerah yang Diamankan	90%		90%		80%		92,55%		116%	90%		221,11%		82%
5.02.003.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.003.1.01.001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.003.1.01.002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%

5.02.003.1.01.003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
5.02.003.1.01.004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
5.02.003.1.01.005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	0	0	0	0	0	0	0%	1	Laporan	1	Laporan	100%
5.02.003.1.01.006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	0	0	0	0	0	0	0%	1	Laporan	1	Laporan	100%
5.02.003.1.01.007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	100%
5.02.003.1.01.008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3	Laporan	0	0	0	0	0	0	0%	3	Laporan	3	Laporan	100%

5.02.003.1.01.009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	laporan	0	0	0	0	0	0	0%	1	laporan	1	laporan	100%
5.02.003.1.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	100%	20	Dokumen	60	Dokumen	300%
5.02.003.1.01.011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100%	8	Laporan	24	Laporan	100%
5.02.003.1.01.012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100%
5.02.003.1.01.013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	150	Orang	100%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal SKPD dapat digunakan beberapa metode antara lain :

1. SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)
2. RAD (Rapid, Application, Development)
3. EUD (End, User, Development)
4. PEST (Political, Economic, Social and Technological)
5. CSF (Critical, Success, Factor)

Dari beberapa metode tersebut dipilih analisis SWOT karena dipandang paling sesuai untuk diaplikasikan. Analisis kondisi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui dengan menggunakan analisa dan metode SWOT:

2.2.1 Strength (kekuatan) Internal

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/ Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/ Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Sebagai mediator antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/ kota terkait dengan distribusi belanja bagi hasil pajak daerah;
4. Memiliki sarana prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 04 Juli 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga diperlukan sosialisasi kepada stakeholder.

2.2.2 Weaknesses (kelemahan), internal

1. Penerbitan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Adanya lembaga/ instansi yang masih memiliki sikap egosektoral dalam menjalankan suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor lain yang ada;
3. Masih adanya sebagian ASN yang kurang memiliki komitmen dalam memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas (pengelolaan keuangan dan aset daerah) ritme dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan aset serta rendahnya tingkat kemauan dan wawasan, terutama dibidang keuangan dan aset daerah.

2.2.3 Opportunities (Peluang) external

1. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, Surat Perintah Pembayaran, dan melakukan pembayaran permintaan Pengguna Anggaran (PA) atas beban rekening kas umum daerah, untuk itu BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
3. Sesuai pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kab/Kota tertentu untuk kesimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat;
4. Adanya beberapa peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4 Threats (ancaman) external

1. Banyaknya aplikasi-aplikasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan pada umumnya dan pengelolaan keuangan dan aset pada khususnya, yang mana antar aplikasi satu dengan lainnya tidak terkoneksi dengan baik sehingga menyebabkan ketidaklancaran dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset.
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya berakibat kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang.

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

[illegible]

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, didalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan nilai yang wajar, sementara dalam pencatatan berdasarkan nilai perolehan/ kontrak
2. Pada Sebagian besar asset tetap berupa tanah belum dilengkapinya bukti kepemilikan barang milik daerah
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
4. Untuk melakukan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah diperlukan data yang akurat terkait barang milik daerah;
5. Belum tersosialisasinya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Tidak adanya kebijakan yang tegas mengatur pembagian tugas dan wewenang antara BPKAD dengan Biro Perekonomian terkait pengelolaan BUMD;
7. Belum ada juga kebijakan yang spesifik mengatur pengelolaan barang milik daerah yang merupakan barang yang dibawah kewenangan pengelola (barang milik daerah Provinsi)
8. Penyusunan RKA - SKPD dan DPA- SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
9. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;
6. Integrasi sistem antar pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat urgen dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset. Integrasi system ini juga sangat urgen dalam hal fungsi penatausahaan dengan aplikasi perbankan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.
7. Penyusunan peta proses bisnis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti dengan penyempurnaan dan peningkatan implementasi..
8. Upaya pembentukan Lembaga yang nantinya sebagai institusi untuk operasionalisasi/pengelola BMD yang berada dibawah kewenangan pengelola barang, dalam hal ini adalah UPTD Pengamanan Dan Pemanfaatan BMD.

2.4 **Review terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Berdasarkan rancangan akhir RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut

Tabel.2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Rancangan Awal						Hasil analisis kebutuhan (Perubahan)					
No	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribuan)	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribuan)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kaltim	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap urusan keuangan	90 %		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kaltim	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap urusan keuangan	90 %		
a.	Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kaltim	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.061.085.464	Perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kaltim	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.200.961.664	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	32.187.225.593	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	32.187.225.593	
c.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	922.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	922.200.000	
d.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.879.010.600	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.879.010.600	
e.	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	21.492.915.790	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	23.063.665.189	
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	5.982.285.200	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	7.365.978.200	

g.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16.918.195.674	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12.409.260.674	
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10.210.551.216	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11.745.193.816	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kaltim	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	80 %	5.540.936.891.552	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kaltim	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	80 %	6.982.708.810.097	
a.	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	7.011.568.089	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	8.639.192.089	
b.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota	Kaltim	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	753.364.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota	Kaltim	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	893.924.000	
c.	Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	6.275.277.885	Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	6.738.751.165	
d.	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.166.231.160	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.521.492.870	
e.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.520.265.915.418	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	6.959.457.831.773	

f.	Pengelolaan Data Dan Implementasi System Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	1.464.535.000	Pengelolaan Data Dan Implementasi System Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kaltim	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	1.468.618.200	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kaltim	Presentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola Dengan Baik	90 %	6.973.836.564	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kaltim	Presentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola Dengan Baik	90 %	8.664.301.564	
a.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	6.973.836.564	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	8.664.301.564	
			Jumlah		5.639.564.197.653			Jumlah		7.083.146.607.397	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa pembandingan antara program/kegiatan, lokasi indikator, target dan pagu DPA BPKAD Provinsi Kaltim dengan Rencana Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam menjalankan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang keuangan

Dalam pelaksanaan tugasnya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Perda Dan Pergub Tentang APBD Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Ditetapkan Tepat Waktu	-	-
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Presentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola Dengan Baik		
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kaltim/Luar Kaltim	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Keuangan		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, masing-masing pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan

program pembangunan daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Perubahan Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 antara lain

- a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat/ ASN
- b. Memusatkan tujuan/arah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;

- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
- d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU, DAK).

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Perubahan Renja BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2023

Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program, kegiatan dan pengelolaan APBD.
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipasi, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Terbitnya Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
- b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- d. **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**
 - e. **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - f. **Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**
- 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.**
- a. **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**
- a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - c. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - d. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - e. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - f. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - g. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**
 - h. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

3.4 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Beserta Anggaran

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dokumen Perubahan Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran dari dokumen Perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja (RENJA) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2023 merupakan implementasi dari Perubahan Renstra Tahun 2019-2023

Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan tertuang dalam Perubahan Renja Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				Target		Pagu
5.02.5.02.5.02.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					Rp 7.970.166.837.650,00
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan		90	%	Rp 91.644.345.737,00
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp 2.200.961.664,00
5.02.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	2	Dokumen	Rp 876.179.664,00
5.02.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp 207.120.000,00
5.02.001.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp 80.832.400,00
5.02.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp 220.852.400,00
5.02.001.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp 109.052.400,00
5.02.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Timur	2	Laporan	Rp 354.113.400,00
5.02.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	7	Laporan	Rp 352.811.400,00
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp 32.187.225.593,00
5.02.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kalimantan Timur	124	Orang/ Bulan	Rp 29.223.668.593,00

5.02.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalimantan Timur	400	Dokumen	Rp	1.827.960.000,00
5.02.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kalimantan Timur	400	Dokumen	Rp	464.453.000,00
5.02.001.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	105.672.000,00
5.02.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	128.620.000,00
5.02.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kalimantan Timur	3	Dokumen	Rp	286.104.000,00
5.02.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kalimantan Timur	3	Laporan	Rp	85.748.000,00
5.02.001.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	65.000.000,00
5.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	922.200.000,00
5.02.001.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	922.200.000,00
5.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	1.879.010.600,00
5.02.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kalimantan Timur	1	Paket	Rp	249.048.600,00
5.02.001.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	96.912.500,00
5.02.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kalimantan Timur	140	Orang	Rp	1.360.841.000,00
5.02.001.1.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kalimantan Timur	140	Orang	Rp	172.208.500,00
5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	22.018.500.190,00
5.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Paket	Rp	139.661.240,00

5.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Paket	Rp	16.327.412.940,00
5.02.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Paket	Rp	1.350.279.000,00
5.02.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Paket	Rp	382.750.000,00
5.02.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalimantan Timur	6	Laporan	Rp	610.686.500,00
5.02.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	996.214.510,00
5.02.001.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	2.211.496.000,00
5.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	7.221.897.200,00
5.02.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kalimantan Timur	1	Unit	Rp	2.077.034.000,00
5.02.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kalimantan Timur	20	Unit	Rp	5.144.863.200,00
5.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	13.469.356.674,00
5.02.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	68.480.000,00
5.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	6.803.978.700,00
5.02.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	117.054.800,00
5.02.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	6.479.843.174,00
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	11.745.193.816,00
5.02.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kalimantan Timur	6	Unit	Rp	98.258.400,00

5.02.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kalimantan Timur	25	Unit	Rp 863.074.500,00
5.02.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kalimantan Timur	12	Unit	Rp 521.760.000,00
5.02.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kalimantan Timur	5	Unit	Rp 10.262.100.916,00
5.02.002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan PerGub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu		80	%	Rp 7.869.858.190.349,00
5.02.002.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kalimantan Timur	100	%	8.639.192.089,00
5.02.002.1.01.001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	Kalimantan Timur	12	Bulan	162.100.000,00
5.02.002.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Kalimantan Timur	12	Bulan	153.700.000,00
5.02.002.1.01.003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD	Kalimantan Timur	12	Bulan	1.111.380.000,00
5.02.002.1.01.004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Kalimantan Timur	12	Bulan	937.720.000,00
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kalimantan Timur	37	Dokumen	
5.02.002.1.01.005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kalimantan Timur	12	Bulan	432.156.000,00
		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kalimantan Timur	37	Dokumen	
5.02.002.1.01.006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Kalimantan Timur	12	Bulan	427.956.000,00
5.02.002.1.01.007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD	Kalimantan Timur	12	Bulan	274.460.000,00
5.02.002.1.01.008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kalimantan Timur	12	Bulan	176.060.000,00

	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kalimantan Timur	0	Dokumen	
5.02.002.1.01.009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kalimantan Timur	12	Bulan	302.760.000,00
5.02.002.1.01.011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kalimantan Timur	12	Bulan	4.573.160.089,00
5.02.002.1.01.013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah dan Pemerintah Provinsi	Kalimantan Timur	12	Bulan	87.740.000,00
5.02.002.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	100	%	893.924.000,00
5.02.002.1.02.002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Kalimantan Timur	12	Bulan	Rp 227.812.000,00
5.02.002.1.02.003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	Kalimantan Timur	12	Bulan	Rp 210.712.000,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	0	Laporan	
5.02.002.1.02.004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	10	Laporan	Rp 304.000.000,00
5.02.002.1.02.006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Kalimantan Timur	12	Bulan	Rp 151.400.000,00
5.02.002.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp 6.727.751.165,00
5.02.002.1.03.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp 685.490.000,00
5.02.002.1.03.002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp 78.200.000,00

5.02.002.1.03.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kalimantan Timur	460	Dokumen	Rp	86.672.000,00
5.02.002.1.03.004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	86.758.000,00
5.02.002.1.03.005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kalimantan Timur	16	Dokumen	Rp	1.157.010.985,00
5.02.002.1.03.006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kalimantan Timur	2	Dokumen	Rp	354.947.100,00
5.02.002.1.03.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	1.481.941.800,00
5.02.002.1.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	343.520.000,00
5.02.002.1.03.009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kalimantan Timur	25000	Dokumen	Rp	1.048.425.080,00
5.02.002.1.03.010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	143.926.200,00
5.02.002.1.03.011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	10	Orang	Rp	1.260.860.000,00

5.02.002.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	5.521.492.870,00
5.02.002.1.04.001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kalimantan Timur	4	Laporan	Rp	200.000.000,00
5.02.002.1.04.002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kalimantan Timur	84	Dokumen	Rp	1.747.183.710,00
5.02.002.1.04.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	125.000.000,00
5.02.002.1.04.004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kalimantan Timur	48	Laporan	Rp	200.000.000,00
5.02.002.1.04.005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kalimantan Timur	106	Dokumen	Rp	800.000.000,00
5.02.002.1.04.006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kalimantan Timur	6	Dokumen	Rp	300.000.000,00
5.02.002.1.04.008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kalimantan Timur	576	Dokumen	Rp	250.000.000,00
5.02.002.1.04.009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	150.000.000,00
5.02.002.1.04.010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	100.000.000,00
5.02.002.1.04.011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kalimantan Timur	480	Orang	Rp	1.060.078.000,00
5.02.002.1.04.012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Kalimantan Timur	6	Lembaga	Rp	589.231.160,00
5.02.002.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	7.846.707.212.025,00

5.02.002.1.05.002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	2	Laporan	Rp	11.138.100,00
5.02.002.1.05.008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kalimantan Timur	10	Laporan	Rp	1.198.383.612.300,00
5.02.002.1.05.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kalimantan Timur	21	Laporan	Rp	159.018.877.998,00
5.02.002.1.05.010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kalimantan Timur	16	Laporan	Rp	6.489.293.583.627,00
5.02.002.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	1.368.618.200,00
5.02.002.1.06.002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kalimantan Timur	12	Bulan	Rp	1.368.618.200,00
5.02.003	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik		90	%	Rp	8.664.301.564,00
5.02.003.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	8.664.301.564,00
5.02.003.1.01.001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	748.252.000,00
5.02.003.1.01.002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	99.503.400,00
5.02.003.1.01.003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	168.676.000,00
5.02.003.1.01.004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	149.060.000,00
5.02.003.1.01.005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	644.023.000,00
5.02.003.1.01.006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	196.274.000,00
5.02.003.1.01.007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	2	Laporan	Rp	2.541.536.900,00

5.02.003.1.01.008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	15	Laporan	Rp	511.404.000,00
5.02.003.1.01.009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	167.564.000,00
5.02.003.1.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	20	Dokumen	Rp	2.196.072.364,00
5.02.003.1.01.011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	8	Laporan	Rp	857.724.300,00
5.02.003.1.01.012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	150.071.600,00
5.02.003.1.01.013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	50	Orang	Rp	234.140.000,00

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, disusun berdasarkan Perubahan RENSTRA BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Perubahan Renja-SKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan :

Perubahan Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan program/ kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

5.2 Rencana tindak lanjut

Dengan tersusunnya Perubahan Renja BPKAD Provinsi Kaltim ini, maka rekomendasi untuk pengelola keuangan Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;

- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar PD sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan aset daerah;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKAD Provinsi Kaltim yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.